

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah republik Turkiye menyatakan kemerdekaannya pada Oktober 1923, negara ini telah maju menjadi salah satu kekuatan utama dalam politik internasional. Turkiye sengaja terlibat dalam dunia internasional selama masa pemerintahan Presiden Abdullah Gul agar bisa berpengaruh dalam hubungan dengan negara maju. Selain itu, lokasinya yang berada di persimpangan dua benua memungkinkan partisipasinya dalam perdagangan ekonomi dan penyelesaian konflik tertentu.

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi kunjungan bersejarah dari Presiden Turkiye, Abdullah Gul, ke Jakarta pada tanggal 5 April 2010. Dalam pertemuan bersejarah ini, pemerintah Indonesia dan Turkiye secara teliti membahas tentang prospek dan potensi pembentukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turkiye (IT-CEPA), yang tercermin dalam deklarasi bersama kedua negara. Sebelumnya, pentingnya pembentukan IT-CEPA telah menjadi isu sentral dalam sidang komisi bersama Indonesia-Turkiye ke-7 pada tahun 2008, yang berlangsung di Ankara, Turkiye. Dalam rangka mewujudkan aspirasi bersama ini, diharapkan kesepakatan IT-CEPA akan berperan krusial dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam kerjasama perdagangan kedua negara serta mengokohkan lebih dalam lagi hubungan ekonomi antara Indonesia dan Turkiye. Upaya konkrit dari komitmen tersebut ditandai oleh penandatanganan "Pernyataan Bersama Memulai Negoisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Turkiye (IT-CEPA)" pada tanggal 7 Juli 2017 di Ankara, yang berlangsung setelah kunjungan kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan kehadiran IT-CEPA yang penuh makna ini, relasi ekonomi antara Indonesia dan Turkiye menandakan langkah serius dan terarah, membuka peluang baru untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi di dua negara yang berbeda namun saling berinteraksi.

Tenaga listrik memiliki fungsi yang sangat vital dan strategis dalam mengaktualisasi tujuan Pembangunan nasional¹. Tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi yang dibutuhkan dalam proses Pembangunan nasional. Diprediksikan sampai pada tahun 2025, tingkat perekonomian di Indonesia meningkat diangka 7% - 10% tiap tahunnya. Implikasi dari kenaikan tingkat

¹Revani Fadhilah, "Analisis Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan di Seluruh Indonesia Terhadap Ekonomi Indonesia", Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 14 No. 2, 2019, hal. 1.

perekonomian adalah kebutuhan akan energi listrik semakin tinggi. Sampai dengan tahun 2025, kebutuhan tenaga listrik di Indonesia akan mencapai sekitar 120 gigawatt.²

Indonesia yang merupakan negara kepulauan cenderung memiliki permasalahan terkait dengan pemerataan pembangunan, khususnya Pembangunan di daerah kepulauan. Masih ada 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), bahkan 2.519 desa diantaranya belum teraliri listrik sama sekali. Desa – desa ini Sebagian besar tersebar di Provinsi Papua dan di kawasan timur lainnya. Pemerintah dalam rangka mewujudkan “terang untuk semua”, meluncurkan Program Indonesia Terang atau PIT. Program ini bertujuan menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia satu diantara langkahnya pada tanggal 8 Desember 2015.

Turkiye adalah negara yang pernah mengalami kemunduran beberapa kali masa kemunduran akibat kekacauan ekonomi, Turkiye berhasil pulih dengan cepat dan bangkit dalam kurun waktu 10 tahun. Perkembangan ini kini ditandai dengan kemajuan teknologi terbaik, kesempatan Pendidikan gratis, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran, serta pemerataan akses energi listrik dan Turkiye mempunyai Perusahaan manufaktur ternama di energi listrik . Keberhasilan pemerataan energi ini mencapai angka 98 persen dari masyarakat Turkiye telah memiliki akses listrik. Pencapaian ini dapat menginspirasi negara – negara lain untuk meraih kesuksesan serupa dalam Upaya memebangun kemajuan bagi masyarakatnya. Sebagian besar dari kebutuhan listrik masyarakatnya yaitu sepertiga dari total terpenuhi melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Pada tahun 2017 Presiden Jokowi melakukan kunjungan balasan ke Ankara membahas mengenai kesepakatan Kersajama Indonesia Turkiye. Dan salah satu kesepakatan yang dibentuk adalah kerjasama pemerataan energi listrik dan dibentuk adalah kerjasama pemerataan energi listrik, yang dibentuk pada tanggal 7 Juli 2017 dalam hal pemerataan energi listrik di daerah kepulauan Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan kapal pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang berbentuk kapal dan sebutan kapal itu adalah Karadeniz Powership.

Bentuk kerjasama memungkinkan Kapowership Turkiye untuk memperluas bisnisnya di indonesia sejauh ini, Kapowership Karadeniz Holding Company telah berhasil menyediakan pasokan listrik sebesar 845 MW di Indonesia. Kerjasama Bilateral melalui penyewaan kapal

² Sigit Sukmajati dan Mohammad Hafidz, “Perancangan dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10 MW On Grid di Yogyakarta”, Jurnal Energi & Kelistrikan, Vol. 7 No. 1, 2015, hal. 49

(Marine Vessel Power Plant) MVPP di wilayah kepulauan terpencil membawa manfaatnya tersendiri, terutama mengingat adanya defisit listrik di beberapa wilayah kepulauan yang terisolasi.

Pada bulan Oktober 2016, PT PAL telah menandatangani perjanjian kerjasama yang membuka berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Perjanjian ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk berkolaborasi dalam membangun, mentransfer teknologi dan mengembangkan nilai – nilai lokal dalam sektor armada Indonesia. Dalam kerjasama ini, PT PAL bertanggung jawab untuk membangun empat kapal pembangkit listrik kelas “putri duyung” dengan kapasitas antara 36 hingga 80 MW untuk memasok daya di pulau – pulau Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

MENGAPA INDONESIA MEMINJAM KAPAL PEMBANGKIT LISTRIK DARI TURKIYE?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan ide atau pandangan mengenai prioritas dan kebutuhan utama suatu negara dalam mencapai tujuan dan menjaga kedaulatan serta kesejahteraan warganya. Pendekatan ini menjadi landasan guna memahami bagaimana suatu negara berperilaku dalam arena politik internasional. Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa kepentingan nasional menjadi fondasi paling penting yang mengarahkan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional sebuah negara. Oleh karena itu, tiap-tiap negara berupaya mencapai otoritas yang mencakup upaya membentuk dan menjaga kendali atas negara-negara lain. Menciptakan hubungan yang melibatkan tindakan paksa atau pengawasan dapat diwujudkan dengan cara berbagai tindakan paksa maupun kerjasama.

Menurut perspektif Jack C. Plano dan Roy Olton, konsep kepentingan nasional mengandung arti dan implikasi mencakup tujuan inti dan elemen yang mempengaruhinya menjadi landasan bagi sejumlah pengambil langkah-langkah dalam menyusun kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional adalah konsep yang lazim namun memiliki peran krusial bagi suatu negara. Ini meliputi eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kebebasan,

kesatuan wilayah, keamanan pertahanan, dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, masalah-masalah dalam politik luar negeri bisa meliputi isu-isu terkait kelangsungan hidup, keamanan, ekonomi, politik, atau keamanan sebuah negara atau entitas bangsa. Isu-isu tersebut tergabung dalam ranah politik luar negeri ketika penyelesaiannya mengharuskan aspek hubungan internasional dan negara atau bangsa yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk menangani sendiri.³

Namun, jika isu-isu tersebut bisa diatasi melalui potensi atau daya kemampuan negara secara menyeluruh tanpa melibatkan dimensi luar negeri, maka hal apapun yang menjadi penyebabnya tidak akan diindahkan sebagai aspek dari hubungan internasional.

Umumnya, kepentingan nasional setiap negara melibatkan beragam aspek, termasuk melindungi integritas nasional, menjaga kehormatan negara, dan meningkatkan kekuasaan. Hal ini muncul dikarenakan keterbatasan sumber daya atau kekuatan di tingkat nasional, negara tersebut merasa perlu mengupayakan pemenuhan kepentingan nasionalnya di luar wilayahnya. Dari perspektif konsep kepentingan nasional tersebut, dapat disarikan bahwa tindakan dan sikap para pemimpin politik terhadap permasalahan domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara mereka dalam kaitannya dengan masyarakat internasional.

Dalam mengupas politik luar negeri Indonesia, aspek kesejahteraan ekonomi menjadi elemen yang sangat signifikan bagi negara ini. Oleh karena itu, Indonesia akan melakukan upaya yang harus diupayakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya terkait hal tersebut..

Berdasarkan konsep kepentingan nasional yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepentingan suatu bangsa dalam relasinya dengan masyarakat internasional terkait erat dengan dua tujuan inti, yaitu mencapai kepentingan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan (prosperitas).

Pada umumnya, setiap negara di dunia memiliki tujuan untuk menggalakkan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan ini mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, baik dalam skala keseluruhan maupun individu, yang dapat dicapai melalui berbagai periode waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

³ Jack, C Plano; Roy,Olton;. (n.d.). *The International Dictionary, terj. Wawan Juanda. Third Edition. Clio.*

Salah satu tujuan utama kepentingan nasional suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan dan pengembangan ekonomi negara. Untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam konteks internasional, dibutuhkan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional. Perubahan tersebut memberikan tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga dibutuhkan strategi yang cermat dan terencana.

Kerjasama antara Indonesia dan Turkiye telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Indonesia mencapai kepentingannya untuk memebri fasilitas energi listrik di berbagai daerah Indonesia terutama bagian kepulauan terluar dari Indonesia, dengan kerjasama energi listrik melalui kapal pembangkit listrik. Berbagai bentuk kerjasama tersebut telah meningkatkan peran politik Indonesia di tingkat internasional dan global.

1.3.2 Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama merupakan sebuah bentuk yang mana hubungan terjadi diantara unit individu antara satu dengan lainnya, antar kelompok hingga antar suatu kewajiban untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia tersebut yang dimaksudkan yaitu sebuah perdamaian dunia yang abadi dan menciptakan ketentraman antar bangsa. Kerjasama internasional ini dilaksanakan atau dilakukan setidaknya menggunakan syarat yang ada, diantaranya seperti :

1. Adanya sebuah keharusan yang mana untuk saling menghargai kepentingan nasionalnya masing masing didalamnya atau anggota negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, namun maksud adanya tujuan tersebut karena agar mampu terciptanya suasana yang kondusif dan damai.

2. Untuk mencapai sebuah keputusan bersama, perlu adanya sebuah komunikasi dan juga konsultasi secara berkesinambungan. Hal ini cukup perlu untuk dilakukan, dikarenakan hal tersebut cukup krusial apabila tidak dilakukan. Tanpa adanya komunikasi sebuah kerjasama internasional tidak mampu tercipta dengan baik, dan juga dalam melakukan komunikasi perlu adanya sebuah bahasa yang baik serta tidak menyinggung kedua belah pihak negara dalam bernegosiasi.

Menurut KJ Holsti, kerjasama yang efektif dapat terbentuk ketika masalah-masalah nasional, regional, atau global yang beragam muncul, dan membutuhkan perhatian lebih dari satu negara, sehingga proses kolaborasi menjadi penting.⁴ Setiap pemerintah perlu saling menerapkan pendekatan-pendekatan yang membawa proposal penyelesaian masalah, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan juga bukti-bukti tertulis. Tujuannya adalah untuk memberikan validasi pada suatu usulan atau aspek lainnya, dan dilakukan untuk mengakhiri perundingan dengan mencapai perjanjian yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Tujuan sebuah negara melakukan kerjasama internasional bukanlah tanpa sebab, namun untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimilikinya didalam negerinya sendiri. Maka dari itu, negara perlu mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya diluar negeri. Kerjasama antara Indonesia dengan Turkiye ini termasuk contoh dimana kedua negara sepakat untuk menjalankan kerjasama internasional, yang mana hubungan bilateral yang terjalin merupakan hubungan dua negara dan juga memiliki kebutuhannya masing-masing – masing.

1.3 Hipotesa

Indonesia meminjam kapal pembangkit listrik dari Turkiye karena Indonesia membutuhkan suplai listrik karena banyaknya wilayah kepulauan yang sulit dijangkau dan menggunakan kapal pembangkit listrik yang dapat berpindah menjadi solusi utama dalam mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit listrik yang berlokasi di atas kapal dirancang dengan durasi yang relatif singkat, yaitu 3 sampai 4 bulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini meliputi:

1. Untuk memahami bagaimana proses kerjasama antara Indonesia dan Turkiye terjadi, perlu dipelajari secara detail langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menjalin hubungan kerjasama tersebut.

⁴ Holsti, K., Azhary, M. T.-S., & Herman. (1998). *International politics : a frame work for analysis*. Jakarta: Erlangga.

2. Inisiatif pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan listrik di wilayah kepulauan Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kerjasama Indonesia Turkiye melalui peminjaman kapal. Dan karya ini ditulis dengan studi kualitatif melalui studi literatur yang ada yang kemudian juga melalui pengumpulan data dari buku-buku pustaka, file jurnal dan web yang di download melalui internet. Teknik pengambilan data yang diambil dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber kemudian dibaca dan dianalisis yang paling sesuai dengan tulisan ini.

1.6 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini dapat difokuskan menjadi lebih jelas dan spesifik serta memudahkan penelitian dalam pencarian dan fakta untuk menjawab persoalan yang di angkat dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan yang berfokus pada Kerjasama Indonesia dan Turkiye dalam bidang energi daerah Indonesia timur.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesis, Metode Penelitian, Jangkauan penelitian.

BAB II: BAB yang berisikan Sejarah kerjasama Indonesia dan Turkiye, Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Turkiye, Hambatan Kerjasama Ekonomi antara indonesia dan Turkiye, Inisiatif pembentukkan Comperhensive Economic Partnership Agrremenet antara Indonesia dan Turkiye, Kerjasama Energi Indonesia dan Turkiye.

BAB III: Kesimpulan.